

KETEGANGAN ANTARA STANDAR KURIKULUM NASIONAL DAN TRADISI PESANTREN DALAM PENDIDIKAN ISLAM FORMAL DI INDONESIA

Sibromalisi¹, Nur Cholid², Ghuftron Hamzah³

Universitas Wahid Hasyim¹²³

Alamat e-mail : sibromalisi80@yahoo.com¹, nurcholid@unwahas.ac.id²,
ghuftronhamzah@unwahas.ac.id³

ABSTRACT

The integration of pesantren into Indonesia's formal Islamic education system has produced significant implications for curriculum governance. National curriculum standards emphasizing competency standardization and educational accountability interact in complex ways with pesantren traditions rooted in the transmission of Islamic knowledge, the cultivation of adab, and the authority of the kiai. This study examines the forms of tension between national curriculum standards and pesantren traditions, the conceptual and policy factors underlying these tensions, and their implications for educational practice. Adopting a qualitative library-based research design, this study analyzes scholarly literature, education policy documents, and relevant prior studies using content and thematic analysis. The findings indicate that curricular tensions are multidimensional, involving curriculum structure and content, pedagogical approaches, assessment systems, and institutional governance. These tensions have contributed to shifts in learning orientation, the marginalization of kitab kuning studies, changes in pedagogical relationships, and increasing institutional pressures on pesantren. The study argues that these tensions reflect deeper differences in educational paradigms and power relations between the state and pesantren, underscoring the need for flexible and context-sensitive curriculum approaches to sustain pesantren's intellectual traditions within formal Islamic education.

Keywords: national curriculum, pesantren, formal Islamic education, curricular tension

ABSTRAK

Integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan Islam formal di Indonesia membawa implikasi signifikan terhadap pengelolaan kurikulum pendidikan. Penerapan standar kurikulum nasional yang menekankan standardisasi kompetensi dan akuntabilitas pendidikan berinteraksi secara kompleks dengan tradisi pesantren yang berakar pada transmisi keilmuan Islam, pembentukan adab, dan otoritas kiai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bentuk ketegangan antara standar kurikulum nasional dan tradisi pesantren, faktor konseptual serta kebijakan yang melatarbelakanginya, dan dampak ketegangan tersebut terhadap praktik pendidikan pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

jenis studi pustaka melalui analisis sistematis terhadap literatur ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola ketegangan kurikulum dan implikasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketegangan kurikulum bersifat multidimensional, mencakup struktur dan muatan kurikulum, metode pembelajaran, sistem evaluasi, serta tata kelola kelembagaan pesantren. Ketegangan tersebut berdampak pada pergeseran orientasi pembelajaran, marginalisasi peran kitab kuning, perubahan relasi pedagogis, dan meningkatnya beban institusional pesantren. Penelitian ini menegaskan bahwa ketegangan kurikulum merupakan konsekuensi dari perbedaan paradigma pendidikan dan relasi kuasa antara negara dan pesantren. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian pendidikan Islam dengan menempatkan pesantren sebagai aktor aktif dalam negosiasi kebijakan kurikulum, serta menekankan pentingnya pendekatan kurikulum yang fleksibel dan kontekstual untuk menjaga keberlanjutan tradisi keilmuan pesantren dalam pendidikan Islam formal.

Kata Kunci: kurikulum nasional, pesantren, pendidikan Islam formal, ketegangan kurikulum

A. Pendahuluan

Isu transformasi kurikulum pendidikan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga menjadi fenomena global yang dihadapi berbagai negara dalam upaya menyiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Perubahan kurikulum nasional di berbagai negara mencerminkan tuntutan untuk memperkuat kompetensi abad ke-21 melalui kerangka kompetensi, pendekatan tematik, dan orientasi pada hasil belajar yang dapat diukur secara sistemik (Thornhill-Miller et al., 2023).

Ketegangan terjadi ketika kurikulum formal menuntut standar kompetensi yang seragam dan terukur sementara konteks pendidikan lokal, budaya, dan tradisi keagamaan tidak selalu selaras dengan pola tersebut (Supriyanti et al., 2025). Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pesantren di Indonesia, fenomena ini semakin relevan mengingat pesantren memiliki sistem pendidikan yang khas dalam mencetak kompetensi religius tradisional sekaligus menuntut keterlibatan dalam sistem pendidikan formal nasional yang semakin modern.

Fenomena pada tingkat global tersebut berimplikasi khusus di Indonesia di tengah dinamika kebijakan pendidikan yang terus berkembang. Ketegangan antara standar kurikulum nasional dan tradisi pendidikan pesantren muncul sebagai masalah utama dalam konteks pendidikan Islam formal. Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki metode pembelajaran dan tujuan pendidikan yang berakar pada tradisi keilmuan klasik dan nilai-nilai adab santri yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh standar kurikulum nasional (Marita et al., 2025). Perubahan kurikulum nasional yang semakin menekankan kompetensi akademik formal dan evaluasi standar kompetensi menimbulkan tantangan bagi pesantren dalam menyeimbangkan tuntutan ini tanpa mengorbankan sistem tradisionalnya. Temuan empiris menunjukkan bahwa pesantren mengalami beban ganda dalam mengimplementasikan kurikulum nasional sekaligus mempertahankan kurikulum pesantren sehingga timbul konflik struktural antara tradisi dan tuntutan administrasi pendidikan formal (Ahsan, 2024).

Kondisi ideal dari sistem pendidikan Islam formal adalah terciptanya suatu kurikulum yang tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga memperkuat karakter dan tradisi keilmuan Islam yang khas dalam pesantren (Atikah et al., 2025). Kurikulum ideal tersebut dipahami sebagai suatu sistem pembelajaran yang bersifat kontekstual, fleksibel, dan mampu menjembatani nilai lokal serta kebutuhan kompetensi global, sehingga lulusan pesantren memiliki integritas religius sekaligus keterampilan yang dibutuhkan di era global. Konsep integrasi kurikulum yang adaptif mendukung kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan kompeten secara akademik tanpa kehilangan fondasi pendidikan Islam tradisional (Saleh et al., 2022).

Teori pembangunan kurikulum dan pendidikan plural menunjukkan bahwa sistem kurikulum yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan standar nasional dengan konteks lokal budaya dan nilai sosial masyarakat (Lucia Maduningtias, 2022). Pendekatan hibridisasi kurikulum menjelaskan bagaimana elemen kurikulum nasional dan tradisi lokal dapat saling

melengkapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Teori ini memberikan fondasi teoretis bahwa kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan lokal tidak semestinya diabaikan dalam proses pembentukan standar nasional pendidikan, tetapi justru diintegrasikan secara strategis untuk menghasilkan lulusan yang adaptif dan berdaya saing global (Kusumawati & Nurfuadi, 2024).

Proposisi utama dalam kajian ini adalah bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara strategi integrasi kurikulum dengan keberhasilan pesantren dalam memenuhi standar kurikulum nasional tanpa mengorbankan nilai tradisionalnya (Zarkasyi, 2015a). Meski integrasi kurikulum dianggap sebagai strategi ideal secara teoritis, fakta empiris menunjukkan bahwa implementasinya di banyak pesantren belum optimal karena kurangnya penelitian yang mengkaji secara komprehensif model integrasi yang tepat, serta kurangnya literatur yang mengevaluasi dampak integrasi kurikulum terhadap kualitas pendidikan pesantren. Hal ini menandai adanya celah antara konsep integrasi kurikulum dalam teori

dan praktik implementasinya di lapangan (Darwis et al., 2025).

Gap utama yang belum terjawab dalam penelitian sebelumnya adalah kurangnya kajian pustaka yang secara sistematis menelaah tension antara standar kurikulum nasional dan tradisi kurikulum pesantren dalam konteks pendidikan Islam formal Indonesia, khususnya dengan pendekatan yang menggabungkan tinjauan kebijakan, teori kurikulum, dan implikasi praktisnya. Banyak studi empiris menyoroti tantangan implementasi, tetapi masih sedikit penelitian yang mengidentifikasi secara metodis bagaimana integrasi dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dalam berbagai tipe pesantren (Kusumawati & Nurfuadi, 2024).

Penelitian terbaru mengakui adanya kebutuhan untuk merancang kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap konteks pendidikan pesantren sekaligus memenuhi standar nasional, namun penelitian tersebut belum mendefinisikan secara jelas indikator keberhasilan atau model teoritis yang dapat diadopsi secara luas. Situasi ini memperlihatkan novelty penelitian yang mendalam untuk menutup gap terkait model integrasi kurikulum yang

efektif dan berkelanjutan bagi pendidikan Islam formal di pesantren (Laila et al., 2025a).

Urgensi penelitian ini menjadi semakin jelas mengingat dampak negatif yang akan timbul apabila gap ini tidak segera diatasi, antara lain rendahnya kualitas pendidikan pesantren dalam konteks kompetensi nasional, potensi marginalisasi tradisi keilmuan Islam, serta ketidaksetaraan akses lulusan pesantren terhadap jenjang pendidikan dan dunia kerja yang berbasis standar formal nasional. Hal ini menimbulkan implikasi strategis bagi kebijakan pendidikan nasional dan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis ketegangan antara standar kurikulum nasional dan tradisi pesantren dalam pendidikan Islam formal. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketegangan kurikulum, menganalisis faktor konseptual dan kebijakan yang melatarbelakanginya, serta merumuskan pemahaman teoretis mengenai pola respons pesantren terhadap tuntutan kurikulum nasional.

Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada analisis literatur ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, dan hasil penelitian yang membahas kurikulum nasional, pendidikan pesantren, dan pendidikan Islam formal di Indonesia. Fokus konteks Indonesia dipilih karena pesantren memiliki posisi strategis dan karakteristik unik dalam sistem pendidikan nasional, sehingga menjadi locus yang relevan untuk mengkaji dinamika ketegangan kurikulum secara mendalam.

Dengan demikian, bagian pendahuluan ini menegaskan bahwa kajian tentang ketegangan antara standar kurikulum nasional dan tradisi pesantren tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting secara praktis sebagai dasar untuk merumuskan pendekatan kurikulum yang lebih adil, kontekstual, dan berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis dan mensintesis gagasan, konsep, serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ketegangan antara standar kurikulum nasional dan tradisi pesantren dalam pendidikan Islam formal. Studi pustaka memungkinkan peneliti membangun argumentasi teoretis yang sistematis berdasarkan sumber ilmiah yang kredibel tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Anderson & Allen, 2017).

Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan pendidikan yang membahas kurikulum nasional, pendidikan pesantren, dan pendidikan Islam formal. Sumber sekunder mencakup laporan penelitian, prosiding ilmiah, serta publikasi lembaga pemerintah dan internasional yang relevan dengan topik kajian. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi substansi, otoritas penulis atau lembaga penerbit, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara

sistematis menggunakan basis data ilmiah daring seperti Google Scholar, portal jurnal nasional terakreditasi, serta situs resmi lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci antara lain kurikulum nasional, pendidikan pesantren, pendidikan Islam formal, dan integrasi kurikulum. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi melalui proses penyaringan berdasarkan kesesuaian topik dan kualitas akademik untuk memastikan data yang digunakan relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Hidayat, 2021).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, pola argumentasi, serta temuan utama dalam literatur yang membahas dinamika kurikulum nasional dan tradisi pesantren. Selanjutnya, analisis tematik dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama, seperti standar kurikulum nasional, karakteristik tradisi pesantren, bentuk ketegangan kurikulum, serta model integrasi dan negosiasi yang dikembangkan oleh pesantren. Teknik

ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam dan terstruktur terhadap fenomena yang dikaji (Majidah & Rullyana, 2024).

Keabsahan data dijaga melalui teknik cross-check antar sumber dan perbandingan temuan dari berbagai literatur untuk menghindari bias interpretasi dan kesimpulan sepihak. Selain itu, penggunaan sumber ilmiah yang memiliki dasar metodologis yang jelas dan diterbitkan oleh lembaga atau jurnal yang kredibel menjadi strategi utama untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil kajian (Anderson & Allen, 2017).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Ketegangan antara Standar Kurikulum Nasional dan Tradisi Pesantren

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa ketegangan antara standar kurikulum nasional dan tradisi pesantren dalam pendidikan Islam formal merupakan fenomena yang bersifat struktural, epistemologis, pedagogis, dan institusional (Kahfi, 2025). Ketegangan ini tidak muncul sebagai

konsekuensi teknis semata dari implementasi kebijakan pendidikan, tetapi sebagai hasil pertemuan dua rezim pengetahuan (knowledge regimes) yang memiliki orientasi, tujuan, dan logika legitimasi yang berbeda secara mendasar (Laila et al., 2025b; Zainuri et al., 2025). Dalam konteks ini, pesantren tidak sekadar menghadapi tantangan adaptasi kurikulum, tetapi berada dalam posisi negosiasi identitas pendidikan di tengah dominasi standar negara.

Pada level struktur dan muatan kurikulum, literatur menunjukkan bahwa kurikulum nasional menuntut pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan secara hierarkis dan terukur melalui kompetensi inti, kompetensi dasar, serta profil lulusan yang distandarkan secara nasional. Logika ini berimplikasi langsung pada pengaturan jam belajar, struktur mata pelajaran, dan prioritas konten pembelajaran di lembaga pendidikan formal berbasis pesantren. Sejumlah penelitian mencatat bahwa konsekuensi utama dari penerapan struktur kurikulum nasional adalah terdesaknya ruang pedagogis untuk kajian kitab kuning, baik dari segi kuantitas waktu maupun kedalaman materi (Ihsan et al., 2024; Lukens-Bull,

2001). Ketegangan ini mencerminkan konflik epistemologis antara pengetahuan yang distandarkan secara negara dan pengetahuan tradisional yang diwariskan melalui sanad keilmuan pesantren.

Lebih jauh, kajian kebijakan menunjukkan bahwa kurikulum nasional beroperasi dalam paradigma outcome-based education, di mana nilai pendidikan diukur melalui hasil belajar yang dapat diverifikasi secara administratif (Rambe & M, 2025). Paradigma ini secara inheren berbeda dengan tradisi pesantren yang menempatkan proses internalisasi ilmu, kontinuitas belajar, dan pembentukan adab sebagai inti dari keberhasilan pendidikan (Kusumawati & Nurfuadi, 2024). Literatur mutakhir menegaskan bahwa ketika kurikulum nasional diterapkan tanpa fleksibilitas epistemik, terjadi reduksi makna pendidikan pesantren dari proses pembentukan insan berilmu menjadi sekadar pemenuhan indikator kinerja pendidikan formal.

Ketegangan juga muncul secara signifikan pada level metode pembelajaran. Kurikulum nasional mendorong penerapan pendekatan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek sebagai standar

pedagogis modern (Early et al., 2024). Pendekatan ini diasumsikan universal dan dapat diterapkan pada seluruh konteks pendidikan. Namun, studi tentang pedagogi pesantren menunjukkan bahwa metode bandongan, sorogan, dan talaqqi bukan sekadar teknik pengajaran, melainkan bagian dari sistem transmisi otoritas keilmuan yang meneguhkan posisi kiai sebagai penjaga legitimasi ilmu (Salam et al., 2025). Ketika metode nasional dipaksakan sebagai standar formal, terjadi ketegangan antara pedagogi partisipatif modern dan pedagogi tradisional yang berlandaskan hierarki keilmuan.

Pada aspek evaluasi dan penilaian, literatur memperlihatkan ketimpangan yang lebih tajam. Sistem evaluasi nasional menekankan asesmen berbasis tes, skor numerik, dan pelaporan capaian belajar sebagai dasar akuntabilitas pendidikan. Sebaliknya, dalam tradisi pesantren, penguasaan ilmu diukur melalui kemampuan membaca, memahami, dan mengajarkan kembali teks klasik, serta melalui pengakuan kiai terhadap kelayakan intelektual dan moral santri (Darwis et al., 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan

bahwa sistem evaluasi nasional gagal menangkap dimensi non-kognitif dan kultural tersebut, sehingga capaian pendidikan pesantren tidak sepenuhnya terwakili dalam kerangka penilaian formal negara (Atikah et al., 2025).

Ketegangan evaluatif ini berdampak sistemik karena memengaruhi persepsi mutu pendidikan pesantren di mata negara dan masyarakat. Literatur kebijakan menegaskan bahwa ketika indikator keberhasilan pendidikan direduksi menjadi skor dan sertifikat formal, pesantren berisiko dinilai inferior meskipun memiliki keunggulan substantif dalam pembentukan karakter dan kedalaman keilmuan Islam. Dengan demikian, ketegangan evaluasi tidak bersifat netral, tetapi berfungsi sebagai mekanisme simbolik yang menentukan hierarki nilai pendidikan.

Dimensi ketegangan berikutnya muncul pada aspek administratif dan kelembagaan. Integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan formal membawa konsekuensi birokratis berupa akreditasi, standarisasi tenaga pendidik, pelaporan kurikulum, dan kepatuhan terhadap regulasi pendidikan nasional. Literatur

menunjukkan bahwa logika administratif ini sering kali berbenturan dengan struktur kepemimpinan pesantren yang bersifat karismatik dan berbasis otoritas kiai (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019). Ketegangan administratif ini menandai pergeseran pesantren dari lembaga pendidikan berbasis komunitas menuju institusi pendidikan formal yang tunduk pada logika tata kelola negara.

Secara konseptual, temuan kajian pustaka ini mengonfirmasi bahwa ketegangan antara standar kurikulum nasional dan tradisi pesantren merupakan manifestasi dari relasi kuasa antara negara dan institusi pendidikan berbasis budaya lokal. Literatur internasional menegaskan bahwa standardisasi pendidikan sering kali membawa implikasi hegemonik ketika diterapkan pada sistem pendidikan yang memiliki tradisi epistemologis sendiri (Cstellvi, 2024). Dalam konteks Indonesia, pesantren berada dalam posisi paradoksal sebagai institusi yang diakui secara legal, tetapi sekaligus dibatasi oleh kerangka standar yang berpotensi mereduksi otonomi keilmuan dan pedagogisnya.

Dengan demikian, hasil kajian pada bagian ini menegaskan bahwa ketegangan kurikulum di pesantren formal bukanlah anomali kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari proses integrasi pendidikan berbasis tradisi ke dalam sistem pendidikan nasional yang terstandar. Ketegangan ini menjadi dasar analitis penting untuk memahami mengapa pesantren mengembangkan berbagai strategi adaptasi, kompromi, dan resistensi kurikulum, yang akan diuraikan secara lebih mendalam pada bagian hasil berikutnya.

Faktor Konseptual dan Kebijakan Penyebab Ketegangan Kurikulum

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa ketegangan antara standar kurikulum nasional dan tradisi pesantren tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan implementasi di tingkat lembaga, melainkan berakar pada faktor konseptual dan kebijakan yang bersifat struktural. Literatur menegaskan bahwa kebijakan kurikulum nasional dibangun di atas paradigma pendidikan modern yang menekankan standardisasi, akuntabilitas, dan keterukuran hasil belajar sebagai prasyarat utama

kualitas pendidikan (Cstellvi, 2024). Paradigma ini secara inheren berbeda dengan paradigma pendidikan pesantren yang berorientasi pada transmisi keilmuan Islam, pembentukan adab, dan keberlanjutan sanad intelektual (Rafiqie & Habibi, 2025).

Faktor konseptual pertama yang menjadi sumber ketegangan adalah perbedaan paradigma epistemologis pendidikan. Kurikulum nasional beroperasi dalam kerangka epistemologi modern yang menempatkan pengetahuan sebagai seperangkat kompetensi yang dapat diukur, distandarkan, dan dievaluasi secara kuantitatif. Sebaliknya, tradisi pesantren memandang pengetahuan sebagai proses internalisasi nilai, pemaknaan teks, dan pembentukan otoritas keilmuan yang tidak sepenuhnya dapat direduksi ke dalam indikator kuantitatif (Pathollah & Wassalwa, 2025). Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perbedaan epistemologi ini menyebabkan ketidaksinkronan antara tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan pesantren, sehingga kebijakan kurikulum nasional cenderung tidak mampu merepresentasikan nilai-nilai inti

pendidikan pesantren (Rambe & M, 2025).

Faktor kedua berkaitan dengan dominasi pendekatan standarisasi dalam kebijakan kurikulum nasional. Literatur kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa standarisasi diposisikan sebagai instrumen utama negara untuk menjamin mutu, kesetaraan, dan mobilitas sosial melalui pendidikan formal. Namun, pendekatan ini mengandaikan homogenitas konteks pendidikan, sementara pesantren berkembang dalam kerangka heterogenitas budaya, tradisi, dan otoritas lokal (Kahfi, 2025). Akibatnya, kebijakan kurikulum nasional cenderung bersifat one-size-fits-all dan kurang memberikan ruang adaptasi epistemik bagi lembaga pendidikan berbasis tradisi seperti pesantren.

Faktor ketiga yang memperkuat ketegangan adalah keterbatasan fleksibilitas kebijakan dalam praktik implementasi kurikulum nasional. Meskipun secara normatif regulasi pendidikan memberikan ruang bagi kekhasan satuan pendidikan, literatur menunjukkan bahwa fleksibilitas tersebut sering kali bersifat simbolik dan tidak diikuti oleh mekanisme evaluasi yang kontekstual. Akreditasi,

asesmen nasional, dan pelaporan kurikulum tetap menggunakan indikator baku yang mengukur kepatuhan terhadap standar nasional, bukan keberhasilan adaptasi lokal (Husen Nurcholis Ridwan et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan pesantren berada dalam dilema antara mempertahankan tradisi atau memenuhi tuntutan administratif negara.

Faktor kebijakan berikutnya berkaitan dengan posisi pesantren dalam struktur regulasi pendidikan formal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan hukum terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun, kajian kritis terhadap implementasi undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pengakuan formal tidak selalu diiringi dengan otonomi substantif dalam pengelolaan kurikulum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019). Pesantren tetap diwajibkan mengikuti standar kurikulum formal ketika menyelenggarakan pendidikan berijazah negara, sehingga ruang negosiasi kurikulum menjadi terbatas.

Literatur juga menyoroti adanya asimetri kekuasaan dalam relasi negara dan pesantren sebagai faktor kebijakan yang memperdalam ketegangan kurikulum. Negara berperan sebagai regulator sekaligus evaluator, sementara pesantren berada pada posisi sebagai pelaksana kebijakan. Dalam kerangka ini, pesantren memiliki kapasitas terbatas untuk memengaruhi perumusan kebijakan kurikulum nasional, meskipun kebijakan tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan tradisi keilmuan mereka (Sulaiman & Anam, 2023). Asimetri ini menyebabkan kebijakan kurikulum lebih mencerminkan kepentingan birokrasi pendidikan daripada kebutuhan pedagogis pesantren.

Dari perspektif teoretis, faktor-faktor tersebut dapat dipahami melalui pendekatan sosiologi pendidikan yang melihat kurikulum sebagai arena kontestasi nilai dan kekuasaan. Kurikulum nasional tidak bersifat netral, melainkan merepresentasikan visi negara tentang warga ideal dan kompetensi yang dianggap bernilai secara sosial dan ekonomi. Ketika visi tersebut bertemu dengan pesantren yang memiliki visi pendidikan religius

dan moral yang berbeda, ketegangan menjadi tidak terelakkan (Ulya & Nikmah, 2024; Zarkasyi, 2015b). Dalam konteks ini, ketegangan kurikulum mencerminkan konflik laten antara rasionalitas negara dan rasionalitas tradisi.

Secara keseluruhan, hasil kajian pada bagian ini menunjukkan bahwa ketegangan antara standar kurikulum nasional dan tradisi pesantren diproduksi oleh kombinasi faktor konseptual dan kebijakan yang saling memperkuat. Perbedaan paradigma epistemologis, dominasi standardisasi, keterbatasan fleksibilitas kebijakan, serta asimetri kekuasaan dalam relasi negara–pesantren membentuk kondisi struktural yang menempatkan pesantren dalam posisi negosiasi yang tidak seimbang. Temuan ini memberikan landasan analitis yang kuat untuk memahami mengapa pesantren mengembangkan berbagai strategi adaptasi dan resistensi kurikulum, yang akan dibahas pada bagian hasil berikutnya mengenai model respons pesantren terhadap ketegangan kurikulum.

Dampak Ketegangan Kurikulum terhadap Praktik Pendidikan Pesantren

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa ketegangan antara standar kurikulum nasional dan tradisi pesantren tidak berhenti pada tataran konseptual dan kebijakan, tetapi berimplikasi langsung terhadap praktik pendidikan pesantren secara menyeluruh. Literatur mutakhir mengindikasikan bahwa dampak ketegangan kurikulum bersifat sistemik dan multidimensional, mencakup perubahan orientasi pedagogis, transformasi struktur pembelajaran, pergeseran relasi otoritas keilmuan, serta beban institusional yang semakin kompleks bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam formal (Rambe & M, 2025; Tintingon et al., 2023).

Dampak pertama yang paling menonjol adalah pergeseran orientasi pembelajaran pesantren. Dalam konteks pendidikan formal, pesantren semakin dituntut untuk memprioritaskan capaian pembelajaran yang terukur dan sesuai dengan indikator kurikulum nasional. Literatur menunjukkan bahwa orientasi pembelajaran yang

sebelumnya berpusat pada pendalaman teks klasik dan pembentukan karakter religius mengalami pergeseran menuju pencapaian nilai akademik dan kelulusan berbasis standar negara (Afifah & Asyadulloh, 2021; Syamli & Faris, 2025). Pergeseran ini tidak selalu berlangsung secara eksplisit, tetapi terjadi melalui penyesuaian jadwal, prioritas mata pelajaran, dan fokus evaluasi pembelajaran.

Secara epistemologis, pergeseran orientasi ini mencerminkan transformasi makna keberhasilan pendidikan di lingkungan pesantren. Keberhasilan yang semula dimaknai sebagai kemampuan santri memahami dan mengamalkan ilmu agama secara mendalam mulai diredefinisi dalam kerangka formal sebagai keberhasilan administratif dan akademik. Literatur sosiologi pendidikan menunjukkan bahwa redefinisi ini berpotensi mengubah habitus pendidikan pesantren, terutama ketika logika penilaian eksternal menjadi rujukan utama dalam menentukan kualitas lembaga dan lulusan (Laila et al., 2025a).

Dampak kedua terlihat pada reduksi peran kitab kuning dalam pendidikan pesantren formal.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kitab kuning, yang secara historis menjadi jantung tradisi intelektual pesantren, mengalami marginalisasi dalam struktur kurikulum formal (Ahsan, 2024). Reduksi ini tidak selalu berarti penghapusan, tetapi terjadi melalui pengurangan alokasi waktu, penyederhanaan materi, dan subordinasi kajian kitab terhadap mata pelajaran formal nasional. Dalam beberapa kasus, kajian kitab kuning diposisikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler atau pembelajaran tambahan di luar jam sekolah formal (Atikah et al., 2025).

Dari perspektif pendidikan Islam, marginalisasi kitab kuning memiliki implikasi serius terhadap keberlanjutan tradisi keilmuan pesantren. Literatur menegaskan bahwa kitab kuning bukan hanya sumber pengetahuan, tetapi juga medium pembentukan cara berpikir, etika intelektual, dan identitas keilmuan santri. Ketika posisinya dilemahkan secara struktural, pesantren berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman klasik (Darwis et al., 2025). Dampak ini memperlihatkan bahwa ketegangan kurikulum tidak bersifat netral,

melainkan berpotensi menggeser orientasi keilmuan pesantren secara jangka panjang.

Dampak ketiga berkaitan dengan perubahan relasi pedagogis antara kiai, ustaz, dan santri. Tradisi pesantren menempatkan kiai sebagai figur sentral dengan otoritas keilmuan dan moral yang tinggi (Awwaliyah & Baharun, 2018). Namun, dalam konteks pendidikan formal, otoritas pedagogis mulai terdistribusi kepada guru mata pelajaran formal yang tunduk pada standar profesional dan administratif negara. Literatur menunjukkan bahwa kondisi ini memunculkan dualisme otoritas, di mana kiai tetap memiliki legitimasi kultural, sementara guru formal memiliki legitimasi administratif dan pedagogis dalam struktur sekolah (Husnah & Misra, 2025).

Dualisme otoritas ini berdampak pada dinamika pembelajaran dan relasi kekuasaan di lingkungan pesantren. Sejumlah kajian mencatat bahwa santri mulai membedakan antara pembelajaran “formal” yang berorientasi nilai dan sertifikat dengan pembelajaran “pesantren” yang berorientasi adab dan pendalaman ilmu. Pemisahan ini berpotensi menciptakan fragmentasi

pengalaman belajar santri dan melemahkan integrasi nilai-nilai pesantren dalam keseluruhan proses pendidikan (Habibi, 2024).

Dampak berikutnya adalah meningkatnya beban institusional dan administratif pesantren. Integrasi ke dalam sistem pendidikan formal menuntut pesantren untuk memenuhi berbagai persyaratan administratif, mulai dari akreditasi, pelaporan kurikulum, kualifikasi pendidik, hingga asesmen nasional. Literatur kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa beban administratif ini sering kali tidak diimbangi dengan dukungan sumber daya yang memadai, sehingga pesantren harus mengalokasikan energi dan sumber daya yang signifikan untuk urusan administratif dibandingkan pengembangan pedagogis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019).

Secara institusional, kondisi ini berpotensi menggeser orientasi pengelolaan pesantren dari basis komunitas dan kepercayaan menuju logika manajerial dan birokratis. Sejumlah peneliti menilai bahwa transformasi ini dapat melemahkan fleksibilitas dan kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis tradisi, sekaligus

meningkatkan ketergantungan terhadap regulasi negara (Ahsan, 2024; Sahin, 2018). Dampak ini menegaskan bahwa ketegangan kurikulum memiliki konsekuensi struktural terhadap keberlanjutan pesantren dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil kajian pustaka pada bagian ini menunjukkan bahwa ketegangan antara standar kurikulum nasional dan tradisi pesantren menghasilkan dampak yang kompleks dan saling terkait. Pergeseran orientasi pembelajaran, marginalisasi kitab kuning, perubahan relasi pedagogis, dan beban institusional yang meningkat merupakan manifestasi nyata dari ketegangan tersebut dalam praktik pendidikan pesantren formal. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ketegangan kurikulum bukan sekadar isu kebijakan, tetapi menyentuh inti identitas dan fungsi pendidikan pesantren. Dampak-dampak inilah yang kemudian mendorong pesantren untuk mengembangkan berbagai strategi adaptasi, integrasi, dan resistensi kurikulum, yang akan dianalisis pada bagian berikutnya.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketegangan antara standar kurikulum nasional dan tradisi pesantren dalam pendidikan Islam formal merupakan fenomena struktural yang bersumber dari perbedaan paradigma pendidikan. Kurikulum nasional dibangun atas logika standardisasi, akuntabilitas, dan keterukuran hasil belajar, sementara pendidikan pesantren berakar pada transmisi keilmuan Islam, pembentukan adab, dan otoritas kiai. Pertemuan dua sistem ini menghasilkan ketegangan multidimensional yang tercermin dalam struktur dan muatan kurikulum, metode pembelajaran, sistem evaluasi, serta tata kelola kelembagaan pesantren.

Hasil kajian menunjukkan bahwa ketegangan kurikulum berdampak langsung terhadap praktik pendidikan pesantren, terutama melalui pergeseran orientasi pembelajaran ke arah capaian administratif, marginalisasi peran kitab kuning, perubahan relasi pedagogis antara kiai, ustaz, dan santri, serta meningkatnya beban institusional pesantren. Dampak-dampak tersebut mengindikasikan bahwa integrasi

pesantren ke dalam sistem pendidikan formal tidak bersifat netral, melainkan membawa konsekuensi terhadap identitas dan fungsi pendidikan pesantren sebagai pusat transmisi keilmuan Islam. Kondisi ini menegaskan bahwa ketegangan kurikulum tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis implementasi kebijakan semata.

Secara teoretis, penelitian ini menempatkan kurikulum sebagai arena negosiasi nilai dan kekuasaan antara negara dan pesantren, serta memperkuat pandangan bahwa pesantren merupakan aktor aktif dalam merespons kebijakan pendidikan nasional. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengembangan kebijakan kurikulum yang lebih fleksibel dan kontekstual agar standar nasional dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan tradisi keilmuan pesantren. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan yang bersifat empiris untuk menguji model integrasi kurikulum pesantren yang lebih adil dan berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, B. N., & Asyadulloh, F. (2021).
Pesantren Masa Depan. Urwatul

- Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman, 10(1), 14–36. <https://doi.org/10.54437/URWAT.ULWUTSQO.V10I1.238>
- Ahsan, M. N. (2024). Kontroversi Kurikulum Pesantren dan Tantangan dalam Membangun Standar Mutu Pendidikan : Menemukan Keseimbangan antara Tradisi dan Modernisasi. *Jawda: Journal of Islamic Education Management*, 49–71. <https://doi.org/10.21580/JAWDA.V5I1.2024.22691>
- Anderson, C. J. E., & Allen, M. (2017). Library Research. *The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods*, 862–862. <https://doi.org/10.4135/9781483381411>
- Atikah, S. N., Fitriyah, U., & Nikmah, W. Z. (2025). Integrasi Kurikulum Nasional dalam Sistem Pendidikan Pesantren di Indonesia . *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 24(1). https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1657?utm_source=chatgpt.com
- Awwaliyah, R., & Baharun, H. (2018). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam). *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 19(1), 34–49. <https://doi.org/10.22373/JID.V19I1.4193>
- Cstellvi, J. (2024). Epistemological Obstacles to Social Studies Education. *Trends in Higher Education*, 3(4), 1072–1080. <https://doi.org/10.3390/HIGHERE.DU3040062>
- Darwis, Muh., Jamaluddin, J., & Nasir. (2025). Curriculum Reform in Indonesia: A Literature Review on Educational Policy Dynamics, Vocational Relevance, and Digital Inequality. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 15(1), 52–62. <https://doi.org/10.26858/JIAP.V15I1.74068>
- Early, S. A., Setiyani, S., & Hilaliyah, T. (2024). Penerapan atau Implementasi Kurikulum Nasional di SMP Negeri 4 Kota Serang . *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 53–57. <https://doi.org/10.31004/JRPP.V7I4.39140>
- Habibi, H. (2024). Revitalization of the Islamic Education Paradigm: An Islamic Epistemological Perspective. *Bestari*, 21(2), 102. <https://doi.org/10.36667/BESTAR.I.V21I2.1532>
- Husen Nurcholis Ridwan, Dika Sofyan, & Faruq Naufal Purnama. (2025). Transformasi Pendidikan Pesantren di Era Modern. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 163–186. <https://doi.org/10.62383/ALIANSI.V2I3.909>
- Husnah, M., & Misra, M. (2025). Pendidikan Islam di Era Global dengan Menjaga Nilai, Merangkul Perubahan. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 259–267. <https://doi.org/10.61132/JMPAI.V3I3.1127>
- Ihsan, I., Pabbajah, M., Abdullah, I., & Hidayati, H. (2024). The contestation of national and

- religious curricula in indonesia's madrasas since the passage of the uusp. *Educational Studies*, 50(4), 434–447.
<https://doi.org/10.1080/03055698.2021.1958757>
- Kahfi, M. A. (2025). Dialektika Tradisi dan Inovasi dalam Filsafat Pendidikan Ahmad Dahlan: Relevansinya terhadap Reformasi Nilai Pesantren. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(4), 989–999.
<https://doi.org/10.61104/IHSAN.V3I4.2333>
- Kusumawati, I., & Nurfuadi. (2024). Integrasi Kurikulum Pesantren Dalam Kurikulum Nasional Pada Pondok Pesantren Modern. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(01), 1–7.
<https://doi.org/10.58812/SPP.V2I01.293>
- Laila, ST. N. F., Mufarokah, A., Anwar, H. S., & Mudhofar, A. (2025a). Curriculum Changes in Indonesia: Implementation and its Challenges in Religious Institutions. *Journal of Educational Research and Practice*, 3(1), 16–31.
<https://doi.org/10.70376/jerp.v3i1.266>
- Laila, ST. N. F., Mufarokah, A., Anwar, H. S., & Mudhofar, A. (2025b). Curriculum Changes in Indonesia: Implementation and its Challenges in Religious Institutions. *Journal of Educational Research and Practice*, 3(1), 16–31.
<https://doi.org/10.70376/JERP.V3I1.266>
- Lucia Maduningtias. (2022). Manajemen Integrasi Kurikulum Pesantren Dan Nasional Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan Pesantren. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 323–331.
<https://doi.org/10.31943/AFKARJOURNAL.V5I4.378>
- Lukens-Bull, R. A. (2001). Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia. *Anthropology & Education Quarterly*, 32(3), 350–372.
<https://doi.org/10.1525/AEQ.2001.32.3.350>
- Majidah, & Rullyana, G. (2024). Bibliometric Mapping of Academic Library Research: Trends and Influences in the Journal of Academic Librarianship. *Tibanndaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 8(2), 97–109.
<https://doi.org/10.30742/TB.V8I2.3952>
- Marita, A. I., Salam, A. N., & Suratman. (2025). Analisis Kurikulum Pesantren: Konsep, Tujuan, Dan Implementasi Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 9(3), 41–51.
<https://rel.ojs.co.id/index.php/jkai/article/view/283>
- Pathollah, A. G., & Wassalwa, S. M. M. (2025). Problem Epistemologis Pengembangan Keilmuan Pesantren Berbasis Kitab Kuning. *Al-Qawa'id : Jurnal Studi Bahasa Arab Dan Kitab Turats*, 1(1), 1–13.
<https://turatsstudies.com/index.php/alqawaid/article/view/21>
- Rafiqie, M., & Habibi, E. (2025). Pemberdayaan Pengembangan Karakter: Studi tentang Pendidikan Islam Transformasional di Pesantren.

- Multidisipliner Knowledge, 3(2 Juli). <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/mk/article/view/355>
- Rambe, S. M., & M, A. (2025). Dinamika dan problematika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 4(2), 295–305. <https://doi.org/10.56113/TAKUAN.A.V4I2.128>
- Sahin, A. (2018). Critical Issues in Islamic Education Studies: Rethinking Islamic and Western Liberal Secular Values of Education. *Islamic Education in Contemporary World: Traditions, Rearticulations & Transformation*, 9(11). <https://doi.org/10.3390/REL9110335>
- Salam, M. Y., Suharmon, S., Shidqi, M. H., Yozi, S., & Jistito, D. (2025). Tradisi Keilmuan Pesantren Melalui Integrasi Sorogan dan Bandongan dalam Pembelajaran Kitab Kuning di Sumatera Barat. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(2), 27–46. <https://doi.org/10.55849/ATTASYRIH.V11I2.336>
- Saleh, I. T., Sopiansyah, D., & Ruswandi, U. (2022). Pendidikan Agama Islam Dalam Kurikulum Nasional. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 4(2), 211–219. <https://doi.org/10.47467/JDI.V4I2.898>
- Sulaiman, S., & Anam, H. (2023). Reaktualisasi Pondok Pesantren Terhadap Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Kalimantan Barat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan*, 5(1), 71–88. <https://doi.org/10.24952/TADBIR.V5I1.7134>
- Supriyanti, Kurniawati, D., & Susanto, R. (2025). Analysis of the Minister of Education's Curriculum Policy in the 2019-2024 Vs. 2024-2029 Era. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 17(1), 741–754. <https://doi.org/10.37680/QALAMUNA.V17I1.7127>
- Syamli, A., & Faris, A. (2025). Modernisasi Pesantren di Indonesia: Dialektika Antara Tradisi dan Transformasi Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 8(1), 157–179. <https://journal.ua.ac.id/index.php/jpik/article/view/1017>
- Thornhill-Miller, B., Camarda, A., Mercier, M., Burkhardt, J.-M., Morisseau, T., Bourgeois-Bougrine, S., Vinchon, F., Hayek, S. El, Augereau-Landais, M., Mourey, F., Feybesse, C., Sundquist, D., Lubart, T., Thornhill-Miller, B., Camarda, A., Mercier, M., Burkhardt, J.-M., Morisseau, T., Bourgeois-Bougrine, S., ... Lubart, T. (2023). Creativity, Critical Thinking, Communication, and Collaboration: Assessment, Certification, and Promotion of 21st Century Skills for the Future of Work and Education. *Journal of Intelligence* 2023, Vol. 11, 11(3). <https://doi.org/10.3390/JINTELLIGENCE11030054>
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP*

UNMA, 9(2), 798–809.
<https://doi.org/10.31949/EDUCATIO.V9I2.5088>

Ulya, F., & Nikmah, K. (2024). Upaya Pesantren Dalam Menjaga Tradisi Sanad Keilmuan Di Era Society 5.0. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 14(1), 18.
<https://doi.org/10.22373/JM.V14I1.20668>

Zainuri, S. M., Sirojudin, R., Lazzavietamsi, F. A., Wasehudin, W., & Lugowi, R. A. (2025). Penerapan Metode Pengajaran Klasik dalam Pendidikan Islam Modern. *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 359–376.
<https://doi.org/10.58577/DIMAR.V6I2.387>

Zarkasyi, H. F. (2015a). Modern Pondok Pesantren: Maintaining Tradition in Modern System. *TSAQAFAH*, 11(2), 223.
<https://doi.org/10.21111/TSAQAFAH.V11I2.267>

Zarkasyi, H. F. (2015b). Modern Pondok Pesantren: Maintaining Tradition in Modern System. *TSAQAFAH*, 11(2), 223.
<https://doi.org/10.21111/TSAQAFAH.V11I2.267>